

**DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP
KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

RADYA MISKA SANJAYA
NIM. 170801018

MAHASISWA ILMU POLITIK

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radya Miska Sanjaya

NIM : 170801018

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan
Ekonomi Masyarakat Di Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 28 November 2022

Yang Menyatakan,



Radya Miska Sanjaya

**“DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP
KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA BANDA
ACEH “**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

RADYA MISKA SANJAYA

NIM. 170801018

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdullah Sanj., M.A
NIP. 19647031996031001

Aklima, S.Fil.I., M.A
NIP. 198810062019032009

**“DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP
KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA BANDA
ACEH “**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

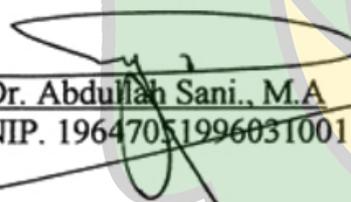
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022 M

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

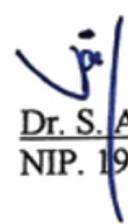
Sekretaris


Dr. Abdullah Sani., M.A
NIP. 19647051996031001


Aklima, S.Fil.I., M.A
NIP. 198810062019032009

Penguji I

Penguji II


Dr. S. Amirulkamar, M.M., M.Si
NIP. 196110051982031007


Arif Akbar, M.A.
NIP. 199110242022031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kota Banda Aceh. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Pada tahun 2014 program ini telah diaplikasikan di 34 provinsi di Indonesia. Salah satu kota di Provinsi Aceh yang juga melaksanakan Program Keluarga Harapan adalah Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 masih relatif tinggi yaitu sebesar 20,95 ribu jiwa dari total penduduk, dengan persentase sebesar 10,32%. Hingga tahun 2019, tercatat jumlah penerima bantuan PKH di Banda Aceh mencapai 8.537 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Gampong yang terbanyak penerima program PKH tersebut ialah Gampong Jawa kecamatan Kuta Alam sedangkan gampong paling sedikit penerima program PKH adalah Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dampak positif dan negatifnya Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh pada Gampong Jawa dan Gampong Rukoh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Program bantuan PKH pada gampong Jawa terlihat tidak berdampak pada perekonomian masyarakat gampong Jawa. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat gampong Jawa yang tidak sejahtera dari segi ekonomi bahkan banyak anak-anak gampong Jawa yang seharusnya usia sekolah tidak bersekolah dengan alasan kekurangan dari segi ekonomi. Namun berbanding terbalik yang terjadi di Gampong Rukoh dimana pendidikan anak anak gampong Rukoh terjamin dan terjadi peningkatan terhadap perekonomian masyarakat Rukoh. Hal ini menandakan adanya dampak positif dari program PKH terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat gampong Rukoh.

Kata Kunci: *Dampak Program PKH, Gampong Rukoh, Gampong Jawa, Banda Aceh*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1 Kebijakan Publik	13
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III	15
2.1.3. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan	20
2.2. Kemiskinan.....	21
2.2.1. Kemiskinan Struktural	24
2.2.2. Kemiskinan Kultural	25
2.2.3. Kemiskinan Alamiah.....	26
2.3. Kesejahteraan Sosial.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Pendekatan Penelitian.....	30
3.2. Fokus Penelitian	30
3.3. Lokasi Penelitian	30
3.4. Jenis dan Sumber Data	31
3.5. Informan Penelitian	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data	32
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Profil Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1. Profil Gampong Jawa.....	35
4.1.2. Profil Gampong Rukoh	39
4.2. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kota Banda Aceh pada Gampong Jawa dan Gampong Rukoh.....	43
4.2.1.Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Gampong Jawa.....	43
4.2.2.Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Rukoh	53
4.3. Analisis Penulis.....	59

BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kompleksitas dari permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut kemiskinan itu sendiri melainkan juga implikasinya yang merasuk ke seluruh aspek kehidupan. Kemiskinan suatu fenomena global yang terjadi di Indonesia. Kemiskinan menurut Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial di Kopenhagen pada Maret 1995 merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu hidup layak.¹ Kemiskinan juga dirincikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya. Oleh karenanya kemiskinan menjadi konsep yang dinamis dan konsep yang jelas berupa ketidakmampuan mengatasi kehidupan yaitu mencukupi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan dan perumahan.² Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandang dan

¹Regina Pamela Saroinsong, Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, media neliti, jurnal tahun 2019

² Rudy Hendra Pakpahan, Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security), Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2 - Juli 2012.

tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial.³

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan memiliki beberapa faktor penyebab yang dilihat dari berbagai perspektif. Penyebab tersebut bergantung pada situasi dan kondisi penduduk di suatu tempat. Terkadang kebutuhan penduduk miskin di suatu tempat berbeda dengan kebutuhan penduduk miskin di tempat lainnya. Sehingga sangat sulit untuk memastikan masalah-masalah dan sebab terjadinya kemiskinan.⁴

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan program penanggulangan kemiskinan, melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai diluncurkan pada tahun 2007.⁵ PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin klaster pertama berupa bantuan tunai bersyarat (*Cash Conditional Transfer*). Syarat yang diterapkan dalam program ini merupakan bentuk intervensi untuk membidik masalah kesejahteraan dan kesenjangan gender

³ Redjeki, Sri. M Guntara. P Anggoro. 2014. Perancangan Sistem Identifikasi dan Pemetaan Potensi Kemiskinan untuk Optimalisasi Program Kemiskinan. Jurnal Sistem Informasi Vol. 6 No. 2. Oktober 2014

⁴ Aldus Mahioborang, Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat (Suatu Studi Di Kabupaten Sangihe), Media neliti, jurnal tahun 2019

⁵ Rudy Hendra Pakpahan, Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security), Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2 - Juli 2012.

dalam kehidupan sehari-hari. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.⁶

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Adapun indikator program PKH dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam mengakses layanan dan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan serta layanan kesejahteraan sosial, juga mengurangi kesenjangan serta kemiskinan.⁷

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup

⁶ Putri, Depi. 2014. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Tesis. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.⁸

Tujuan diberlakukannya PKH Dalam jangka pendek yakni, dana bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), sedangkan dalam jangka panjang, tujuan PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memutus mata rantai kemiskinan, serta mengubah perilaku Rumah Tangga Miskin (RTM) yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin. Program Keluarga Harapan terfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang pendidikan dan kesehatan. Poin utama dari program ini adalah peningkatan kesadaran dari KPM akan pentingnya pendidikan dan kesehatan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia dimana berdampak pada peningkatan kualitas sosial yang dilakukan secara bersamaan dengan pelayanan pendidikan,

⁸ Jauna skripsi 2021 ,Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kemiskinan Di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

kesehatan, serta berbagai bentuk program bantuan lain seperti Jamkesmas, Raskin, PSKS, dan sebagainya.⁹

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2019 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa. Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2022, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2019-2022. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).¹⁰

Pada tahun 2014 program ini telah diaplikasikan di 34 provinsi di Indonesia. Salah satu kota di Provinsi Aceh yang juga melaksanakan Program Keluarga Harapan adalah Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 masih relatif tinggi yaitu sebesar 20,95 ribu jiwa dari total penduduk, dengan persentase sebesar 10,32%. Kota Banda Aceh memiliki 9 Kecamatan. Hingga tahun 2019, terdaftar jumlah penerima bantuan PKH di Banda Aceh mencapai 8.537 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).¹¹ Gampong yang terbanyak penerima program PKH tersebut ialah Gampong Jawa kecamatan Kuta Alam sedangkan gampong paling sedikit penerima program PKH adalah Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.

⁹ Khodziah Isnaini Kholif, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4 2019 Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

¹⁰. RPJMN 2019-2022

¹¹ Badan Statistik Kota Banda Aceh 2018

Tahun 2018 Gampong Jawa terdata penerima PKH sebanyak 110 penerima pada tahun 2019 sebanyak 115 penerima, 2020 sebanyak 118 penerima dan tahun 2021 sebanyak 127 penerima.¹² Hal ini disebabkan karena mayoritas pekerjaan masyarakat Gampong Jawa sebagai pemulung dan mendaur ulang barang-barang bekas. Sementara di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala setiap tahun mengalami fruktusi kearah yang lebih baik. Data menunjukkan penerima PKH pada tahun 2019 sebanyak 51 orang, pada tahun 2020 sebanyak 52 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 48 orang.¹³ Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat Rukoh yang bekerja di pemerintahan. Dan letak Gampong Rukoh yang dekat dengan perkotaan. Sehingga angka kemiskinan dan penerima PKH di Gampong Rukoh tidak begitu banyak.

Namun demikian, dalam prakteknya, khususnya di Gampong Jawa sendiri, terlihat masih sangat banyak masyarakat tidak sejahtera secara ekonomi. Berdasarkan fenomena di atas peneliti akan membandingkan dampak program PKH terhadap kesejahteraan ekonomi di kedua gampong tersebut dengan judul penelitian **Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus : Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Dan Gampong Rukoh kec Syiah Kuala)**

¹² Rekap data kantor geuchik penerima PKH Gampong Jawa

¹³ Rekap data kantor geuchik penerima PKH Gampong Rukoh

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut bagaimana Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh pada Gampong Jawa dan Gampong Rukoh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi latar belakang dan rumusan masalah, seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penulis menentukan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh pada Gampong Jawa dan Gampong Rukoh.
2. Untuk Mengetahui dampak positif dan negative Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh pada Gampong Jawa dan Gampong Rukoh.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap desa.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Cut Razi Mirsandi dikutip dari skripsi 2019 dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi diKecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat, untuk mengetahui Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat dan untuk mengetahui Apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik pemilihan sampel dengan ketentuan ciri-ciri dan karakteristik objek dalam penelitian (purposive sampling), adapun teknik pengambilan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang diberikan oleh PKH kepada masyarakat yaitu dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Implementasi PKH di Kecamatan Setia melalui beberapa tahapan yang pertama dimulai dari tahap pertemuan awal, tahap kedua memasukan data kesistem informasi Manajemen, tahap ketiga pembayaran dan yang terakhir vefikasi komitmen. Faktor pendorong dan penghambat PKH yang di laksanakan di kecamatan Setia yaitu meski pun belum sepenuhnya terlaksanakan dengan

sempurna, tetapi masyarakat mengakui bahwa program ini telah membantu dan memberikan keringanan kepada masyarakat.¹⁴

Penelitian kedua dilakukan oleh Siswati Saragi dikutip dari jurnal Vol 8 No 1 Tahun 2021 dengan judul Analisis Program Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan tujuan program keluarga harapan dimulai dari penetapan peserta hingga kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan teknik analisis Miles, Huberman dan Saldana, penelitian ini akan menjelaskan penetapan peserta yang dinyatakan layak dan kendala dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang sudah ada di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tetap dilakukan pengecekan kondisi peserta hingga dilakukan ulang oleh Kementerian sosial. Sedangkan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan yaitu masih sulitnya mengumpulkan semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk pengecekan dan pembinaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang sudah ada di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tetap dilakukan pengecekan kondisi peserta hingga dilakukan ulang oleh Kementerian sosial. Sedangkan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan yaitu masih sulitnya mengumpulkan semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk pengecekan dan

¹⁴ Cut Razi Mirsandi skripsi 2019 dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya). Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

pembinaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang sudah ada di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tetap dilakukan pengecekan kondisi peserta hingga dilakukan ulang oleh Kementerian sosial. Sedangkan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan yaitu masih sulitnya mengumpulkan semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk pengecekan dan pembinaan.¹⁵

Penelitian ketiga dilakukan oleh Jauna dikutip dari skripsi 2021 dengan judul Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kemiskinan Di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat (1) bagaimana peran pemerintah desa terhadap Program Keluarga harapan (PKH), (2) dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan, (3) faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dengan tujuan menganalisis pelaksanaan PKH yakni di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran pemerintah desa terhadap Program Keluarga Harapan yaitu melakukan pendataan keluarga miskin untuk mendapatkan bantuan, penyaluran yaitu pemerintah desa bekerja sama dengan agen BRI link untuk memudahkan keluarga miskin melakukan pencairan bantuan tanpa harus ke kantor pos untuk pencairan bantuan, memvalidasi data penerima PKH ketika peserta tersebut sudah beralih status menjadi keluarga

¹⁵ Siswati Saragi jurnal Vol 8 No 1 Tahun 2021, Analisis Program Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik.

sejahtera, merubah pola pikir KSM dengan mengadakan sosialisasi yang diadakan setiap bulannya bersama pendamping PKH tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan serta pembinaan ekonomi dengan pemberian modal usaha kepada keluarga miskin untuk menambah penghasilan KPM. (2) dampak PKH terhadap kemiskinan yaitu menyadarkan masyarakat untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah, sadar pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak untuk masa depan mereka kedepannya. Namun disisi lain timbulnya kecemburuan sosial antara penerima bantuan dengan orang yang tidak mendapatkan bantuan. (3) faktor penghambat yang mempengaruhi PKH terhadap kemiskinan di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari yaitu data tersebut turun langsung dari pusat bersifat top down bukan bottom up sehingga data tersebut berbeda dengan keadaan lapangan dan nama peserta yang tidak berhak menerima bantuan tersebut tidak bisa ditukar atau ditambah.¹⁶

Penelitian keempat dilakukan oleh Khodiziah Isnaini Kholif dikutip dari Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4 2019 dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini dilakukan atas dasar terdapatnya kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Sebagai upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Salah satu program itu adalah PKH. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi PKH dan faktor yang dihadapi PKH dalam menanggulangi kemiskinan. Metode

¹⁶ Jauna skripsi 2021 ,Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kemiskinan Di Desa Teluk Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Tujuan PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Masih adanya kemiskinan, gizi buruk, ibu meninggal karena melahirkan, serta rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Saran yang dapat dilaksanakan yakni mengevaluasi kebijakan serta pemberian penghargaan kepada perseorangan.¹⁷

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terlihat pada tempat penelitian dimana peneliti ini fokus di Kota Banda Aceh yaitu Gampong Jawa dan Gampong Rukoh. Sedangkan penelitian di atas rata-rata lokasi penelitian dilakukan di pulau jawa.

¹⁷ Khodziah Isnaini Kholif, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4 2019 Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serentetan intruksi atau perintah dari para pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Chandler dan Plano kebijakan publik adalah pemamfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Sedangkan Menurut Woll kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Adapun pengaruh dari tindakan pemerintah tersebut adalah :

1. Adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
2. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil yang membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.

3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.¹⁸

Berdasarkan definisi dari kebijakan publik menurut Woll yang menjelaskan kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Artinya bahwa Program Keluarga Harapan merupakan salah satu kebijakan publik dari pemerintah yang memiliki tujuan khusus dan jelas yaitu mengurangi kemiskinan dan memberikan kesejahteraan rakyat. Selain itu, program ini memiliki landasan hukum yang telah disahkan oleh pemerintah dan adanya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung program ini.¹⁹

Kebijakan juga berfungsi menilai keselarasan antara teori kebijakan dengan praktek implementasi dilapangan yang berupa dampak, apakah Program Keluarga Harapan yang diterapkan sesuai dengan perkiraan. Dari hasil penelitian lapangan ini dapat dilihat secara langsung apakah Program Keluarga Harapan sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan program tersebut yaitu mengurangi kemiskinan sehingga memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat desa sebagai peserta penerima manfaat.²⁰

¹⁸Eky Riskiana, "Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wono Pringo)", Skripsi Universitas Negeri Semarang, (2020), hlm. 47

¹⁹ Ibid, hlm 48

²⁰ Ibid, hlm 48

2.1.2. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Untuk mengetahui apakah implementasi suatu program sudah berjalan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) atau belum, maka George C. Edward III menilai ada beberapa faktor penting yang turut mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Adapun faktor-faktor tersebut di antaranya adalah Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi (Kecenderungan) dan Struktur Birokrasi.²¹

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran atau fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Kelemahan dalam proses kebijakan publik pada tahap implementasinya salah satunya terletak pada faktor komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi. Komunikasi seharusnya sudah dibangun sejak formulasi, sehingga muatan-muatan atau materi yang akan dilakukan menjadi “jiwa” suatu kebijakan dapat diketahui dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang. Komunikasi dalam kebijakan publik pada tataran implementasi sangat diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk.²²

Suatu kebijakan harus dikomunikasikan secara tepat, akurat, dan konsisten, yang diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di

²¹ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014), hlm. 250-254

²² Ibid hlm 256

dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

a. Transmisi

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksanaan tidak menyetujui kebijakan (disposisi) dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi ketika kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang terlapis atau tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai sumber daya.

b. Kejelasan

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, diantaranya:

- Kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legeslatif sehingga cenderung menyerahkan pelaksanaannya kepada bawahan.
- Adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut.

- Kebutan yang mencapai consensus antara tujuan yang saling bersaing, saat merumuskan kebijakan tersebut.
- Kebijakan baru yang para perumusny belum terlalu menguasai masalah.
- Biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum.²³

c. Konsistensi

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga harus konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan pemerintah yang tidak konsisten akan menghambat pelaksanaan. Banyak hal yang menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya:

- Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan.
- Kesulitan yang muncul saat memulai implementasi kebijakan baru.
- Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau bertentangan dengan kebijakan lain.
- Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.²⁴

²³ Ibid hlm 257

²⁴ Ibid hlm 259

2. Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut.

1. Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Kewenangan, yakni kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, serta kewenangan untuk meminta kerja sama dengan badan pemerintah yang lain.
4. Fasilitas, dimana fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, maka implementasi juga tidak akan efektif.²⁵

3. Disposisi (Kecenderungan)

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki komitmen yang tinggi agar mampu mencapai

²⁵ Ibid hlm 259

tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut.

1. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan, namun pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang memengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem lain, maka pembuat implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan terletak pada ketidakmampuan dalam menghadapi kemampuan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksana suatu program tidak efektif.
2. Arahan dan tanggapan pelaksanaan, hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijakan.
3. Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.²⁶

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Sehingga perlu adanya *Standar operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksana program melibatkan lebih dari satu institusi. Adapun

²⁶ Ibid hlm 260

fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapainya.²⁷

2.1.3. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.²⁸

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

²⁷ Ibid hlm 260

²⁸ Ibid hlm 280

- a. tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang,
- b. adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah
- c. pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.²⁹

2.2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut

²⁹ Ibid hlm 280

miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.³⁰

Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin. Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.³¹

³⁰ Gunawan, Mujiyadi, Styosoemarno. Pengembangan Model Pemberdayaan Keluarga Miskin di Sekitar Kawasan Industri. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. 2006 hlm 43

³¹ Ibid hlm 44

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.³²

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik. Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga

³²Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang kemiskinan

memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*).³³

2.2.1. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan struktural muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah buruh tani, pemulung, penggali pasir dan mereka yang tidak terpelajar dan tidak terlatih. Pihak yang berperan besar dari terciptanya kemiskinan struktural adalah pemerintah. Sebab, pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin. Kalau pun ada lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan, sehingga tidak ada masyarakat miskin yang “naik kelas”. Artinya jika pada awalnya sebagai buruh, nelayan, pemulung, maka selamanya menjadi buruh nelayan dan pemulung. Kemiskinan ini timbul, karena ada hubungan sosial ekonomi yang membuat kelompok orang tereksklusif dari posisi ekonomi yang lebih baik. Penyebab tereksklusif adalah

³³Gunawan, Mujiyadi, Styosoemarno. Pengembangan Model Pemberdayaan Keluarga Miskin di Sekitar Kawasan Industri. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. 2006 hlm 45

ketergantungan ekonomi pada negara industri maju, struktur perekonomian nasional jatuh pada segelintir orang (kolusi penguasa dan pengusaha) serta politik dan hubungan sosial yang tidak demokratis.³⁴

2.2.2. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Sikap budaya itu, seperti seseorang atau masyarakat yang merasa berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok ini tidak mudah diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan cenderung tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya. Dengan ukuran absolut mereka miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau dikatakan miskin. Sedangkan, kebudayaan kemiskinan, merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Ciri dari kebudayaan kemiskinan ini adalah masyarakat enggan mengintegrasikan dirinya dalam lembaga-lembaga utama, sikap apatis, curiga, terdiskriminasi oleh masyarakat luas. Dalam komunitas lokal ditemui ada rumah yang bobrok, penuh sesak dan bergerombol. Ditingkat keluarga, masa kanak-kanak cenderung singkat, cepat dewasa, cepat menikah. Pada individu mereka ada perasaan tidak berharga, tidak berdaya dan rendah diri akut. Pandangan lain tentang budaya miskin merupakan efek domino dari belenggu kemiskinan struktural yang menghinggap masyarakat

³⁴ Soleh. M . *Kemiskinan: Telaah Dari Beberapa Situasi Penanggulangan Kemiskinan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, UNY. Yogyakarta 2010, hlm 58

terlalu lama. Keadaan seperti itu membuat masyarakat apatis, pasrah, berpandangan jika sesuatu yang terjadi adalah takdir.³⁵

2.2.3. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.³⁶

Kemiskinan Alamiah juga merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita disebut sebagai *Persistent Poverty* yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir.³⁷

³⁵ Ibid hlm 47

³⁶ Ibid hlm 47

³⁷ Ibid hlm 48

2.3. Kesejahteraan Sosial

Secara harfiah, kesejahteraan sosial mengandung arti yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwodarminto, sejahtera adalah aman santosa dan makmur selamat, terlepas dari gangguan kesukaran dan sebagainya.³⁸ Pengertian sosial, menurut Dr. J.A. Poention, mengandung makna sebagai berikut. Pertama sosial diartikan sebagai suatu indikasi dari kehidupan bersama makhluk manusia, misalnya dalam kebersamaan rasa, berpikir, bertindak, dan dalam hubungan antarmanusia. Kedua sejak abad ke- 19, istilah sosial mempunyai konotasi yang berbeda, lebih sentimental dan karena itu menjadi agak kabur. Seperti beberapa istilah serupa yang dikaitkan dengan persoalan kemiskinan dan kemelaratan prang, sebagai contoh: pekerjaan sosial, pelayanan sosial, dan aksi sosial.³⁹ Namun demikian, dari konotasi ini kemudian berkembang ke segala arah yang bersangkut-paut dengan pembaruan masyarakat, yang bertujuan menanggulangi kemiskinan dan kemelaratan.

Kesejahteraan sosial adalah semua aktivitas intervensi sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial umat manusia. Kesejahteraan sosial juga dapat dipahami sebagai kondisi sejahtera (*wellbeing*) itu sendiri. Karena sebagai kondisi maka kesejahteraan sosial menjadi tujuan capaian atas banyak aspek pembangunan.

³⁸Ibid hlm 48

³⁹ Ibid hlm 49

Dalam bentuk sederhana, sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai empat bagian yang saling berhubungan sebagai berikut:

1. isu-isu sosial
2. tujuan-tujuan kebijakan
3. perundangan/peraturan
4. program-program kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan mengenali isu sosial.

Sekali isu tersebut diakui sebagai perhatian sosial, langkah selanjutnya adalah mengartikulasikan tujuan-tujuan kebijakan. Tujuan-tujuan ini dapat menghasilkan suatu posisi publik yang diciptakan melalui perundangan atau peraturan. Akhirnya, perundangan diterjemahkan ke dalam tindakan melalui penerapan suatu program kesejahteraan sosial.⁴⁰

Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan pembangunan manusia (*human development*). Yang paling berhubungan dengan dengan sistem kesejahteraan sosial bagi para homeless ini adalah *seikatsu hogo*. Pemerintah memberikan perlindungan hidup (*seikatsu hogo*) kepada masyarakat Jepang. *seikatsu hogo* adalah jaminan perlindungan terhadap standart hidup untuk semua warga Jepang dan tidak boleh ada diskriminasi, dan orang yang hidup miskin dapat menuntut pertolongan bantuan dari pemerintah. Kemudian menurut Okamura dalam

⁴⁰ Ibid hlm 50

Takehara Terjemahan : Untuk dapat mengetahui atau memahami masalah kesejahteraan sosial yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah sosial lainnya pertama kita harus mengetahui keadaan dari masalah sosial tersebut. Setelah prinsip dasar itu diketahui, melalui permasalahan hidup kita dapat mendapatkan karakteristik dari kesejahteraan sosial.⁴¹

Kemudian Okamura dalam Takehara juga menjabarkan, Bahwa ada tujuh karakteristik di dalam kesejahteraan sosial yaitu:

1. tuntutan ekonomi yang stabil
2. tuntutan pekerjaan yang layak
3. tuntutan keluarga yang stabil
4. tuntutan jaminan kesehatan
5. tuntutan jaminan pendidikan
6. tuntutan kesempatan dalam bermasyarakat
7. tuntutan kesempatan budaya atau rekreasi

Hal-hal di atas menjadi tuntutan dasar dalam masyarakat sosial. Ketika semua karakteristik atau tuntutan dasar dalam kehidupan bermasyarakat sudah terpenuhi secara otomatis kesejahteraan sosial juga sudah didapat. Okamura dalam Takehara juga menjelaskan Kesejahteraan sosial sebagai bantuan untuk dapat fokus kepada aspek subjektif dari kesulitan dalam hubungan sosial dan bantuan harus dibedakan dengan kebijakan sosial lainnya.⁴²

⁴¹ Ibid hlm 50

⁴² Ibid hlm 52

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk Mengetahui Dampak Program PKH Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kota Banda Aceh. Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.⁴³ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan membahas tentang Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kota Banda Aceh (Studi Kasus: Gampong Jawa Kec. Kuta Raja dan Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja dan Gampong Rukoh kec Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

⁴³ Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.11

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

- Data primer ,yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi, wawancara langsung dengan informan.
- Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian Program Keluarga Harapan.⁴⁴

3.5. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Geuchik Gampong Jawa	1
2	Geuchik Gampong Rukoh	1
3	Pengawas PKH	2
4	Masyarakat penerima PKH Gampong Jawa	3
5	Masyarakat penerima PKH Gampong Rukoh	3
	Jumlah	10

⁴⁴ Ibid hlm 12

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁵ Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian.⁴⁶ Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap objek alam lainnya, agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.

⁴⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

⁴⁶ Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi, hlm.165

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).⁴⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.⁴⁸

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan

⁴⁷Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm.23

⁴⁸Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.100

membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

c. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.⁴⁹

⁴⁹ Ibid hlm 105

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Lokasi Penelitian

4.1.1. Profil Gampong Jawa

a) Geografis Gampong Jawa

Gampong Jawa merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh. Gampong Jawa terletak di daerah pesisir pantai, tepat berada di ujung gampong Jawa, yang berdekatan dengan pantai, dan di sana lah terdapat gunung sampah hasil dari tumpukan sampah-sampah yang dilakukan oleh petugas dinas kebersihan, yang sering disebut sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Gampong Jawa memiliki luas tanah sekitar 150,60 Ha, dengan batas wilayah sebelah Timur berbatasan dengan Krueng Aceh, sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pande, sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Peulanggahan dan di sebelah Utara berbatasan dengan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), seperti yang tertera dalam tabel berikut :

No	Batas Wilayah	Batas dengan Gampong	Batas Lain
1	Sebelah Utara	Lokasi TPA dan IPLT	Laut
2	Sebelah Timur	Gampong Pande	-
3	Sebelah Barat	Gampong Peulanggahan	-
4	Sebelah Selatan	Krueng Aceh	Sungai

Sumber: Data Hasil Dokumentasi Kantor Geuchik Gampong Jawa Pada Tahun 2021

Gampong Jawa Terdiri dari Lima Dusun dengan Luasnya Masing-Masing

sebagai berikut:

No	Nama Dusun	Nama Kadus	Luas Wilayah
1	Nyak Raden	Mohd Saleh	25, 13 Ha
2	Hamzah Yunus	T. Taufik	15, 37 Ha
3	Tuan Dibanda	Mahdi Z	18, 30 Ha
4	Said Usman	Zulhendra Surya	43, 19 Ha
5	Tgk Muda	Irwansyah	46, 60 Ha
	Jumlah		150, 60 Ha

Sumber: Data Hasil Dokumentasi Kantor Geuchik Gampong Jawa Pada Tahun 2021

Dari tabel di atas menunjukkan luasnya wilayah Gampong Jawa. Berdasarkan 5 dusun, yang masing-masing Dusunnya memiliki luas wilayah yang berbeda-beda dan masing-masing dusun itu ditangani oleh 1 orang Kadus, seperti Dusun Nyak Raden yang memiliki luas wilayah sekitar 25,13 Ha Kepala Dusunnya Mohd Saleh, Dusun Hamzah Yunus memiliki luas wilayah 15,37 Ha Kadusnya T. Taufik, sedangkan Dusun Tuan Dibanda memiliki wilayah sekitar 18,30 Ha Kadusnya Mahdi Z, Dusun Said Usman yang memiliki wilayah sekitar 43,19 Ha Kadusnya Zulhendra Surya dan Dusun Tgk. Muda yang memiliki luas wilayah sekitar 48,61 Ha Kadusnya Irwansyah, dan jumlah keseluruhan wilayah di Gampong Jawa adalah 150,60 Ha.

b) Kependudukan Gampong Jawa

Jumlah Penduduk dalam Setiap Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut:

No	Dusun	Jumlah Penduduk		
		LK	PR	Jumlah
1	Nyak Raden	191	172	363
2	Hamzah Yunus	220	215	435
3	Tuan Dibanda	212	214	426
4	Said Usman	415	404	819
5	Tgk Usman	521	492	1013
	Total	1559	1497	3056

Sumber: Data Hasil Dokumentasi Kantor Geuchik Gampong Jawa Pada Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap dusun yang ada di Gampong Jawa, di dusun Nyak Raden terdapat laki-laki berjumlah 191 jiwa dan perempuan 172 jiwa, jadi jumlah keseluruhannya adalah 363 jiwa, di dusun Hamzah Yunus terdapat laki-laki berjumlah 220 jiwa dan perempuan 215 jiwa, jadi jumlah keseluruhannya adalah 435 jiwa, dusun Tuan Dibanda terdapat laki-laki 212 jiwa dan perempuan 214 jiwa, jadi jumlah keseluruhannya adalah 426 jiwa, sedangkan di dusun Said Usman terdapat laki-laki 415 jiwa dan perempuan 404 jiwa, jadi keseluruhannya adalah 819 jiwa, dan di dusun Tgk. Muda terdapat laki-laki 521 jiwa dan perempuan 492 jiwa, dan keseluruhannya adalah 1.013 jiwa dan jumlah pemulung di dusun Tgk. Muda berjumlah 470 jiwa, jadi di Gampong

Jawa pada umumnya terdiri laki-laki sekitar 1.559 jiwa dan perempuan 1.497 jiwa, sehingga bisa kita lihat bahwa jumlah laki-laki di Gampong Jawa lebih banyak dari pada jumlah perempuan.

Data Penduduk Menurut Kepercayaan yang Dianut sebagai berikut:

No	Dusun	Jumlah Kepercayaan				
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha
1	Nyak Raden	371	0	0	0	0
2	Hamzah Yunus	434	0	0	0	0
3	Tuan Dibanda	423	0	0	0	0
4	Said Usman	835	0	0	0	0
5	Tgk Muda	987	6	0	0	0
Jumlah		3.050	6	0	0	0
		3.0356				

Sumber: Data Hasil Dokumentasi Kantor Geuchik Gampong Jawa Pada Tahun 2021

Dari tabel di atas bisa kita simpulkan bahwa di Gampong Jawa dominan penduduknya beragama Islam walaupun ada juga yang beragama Katolik.

Sarana Pendidikan di Gampong Jawa sebagai berikut:

No	Sarana Pendidikan	Unit
1	TK	1
2	SD	1
3	SLTP/MTSN	1
4	SMU/MAN	1
5	Balai Pengajian	7
	Jumlah	11

Sumber: Data Hasil Dokumentasi Kantor Geuchik Gampong Jawa Pada Tahun 2021

Dari tabel di atas menunjukkan gambaran sarana pendidikan yang ada di Gampong Jawa, seperti TK ada 1 unit dan SD 1 unit SLTP 1 unit dan balai pengajian ada 6 unit dan di Gampong ini tidak ada tersedianya pesantren/dayah.

4.1.2. Profil Gampong Rukoh

a) Kondisi Geografis

Rukoh merupakan sebuah gampong di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang keadaan topografinya terdiri dari dataran yang padat penduduk dengan luas wilayah pertahun 2014 adalah 124,82 Ha dengan rincian sebagai Berikut:

1. Luas Perkebunan 24 Ha
2. Luas Tambak 16,42 Ha
3. Luas lahan Sawah 60 Ha

4. Sarana Pendidikan 20 Ha
5. Pertokoan 10 Ha Jarak Gampong Rukoh dengan pusat kota Banda Aceh berkisar sekitar 4 km atau ¼ jam.

Hal ini memudahkan bagi masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas sehari-hari baik administrasi maupun aktivitas ekonomi masyarakat yang mudah di jangkau. Adapun batas-batas wilayah Gampong Rukoh sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Baet kecamatan Baitussalam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Kopelma Darussalam dan Tanjung Selamat Kecamatan Syiah Kuala/ Darussalam

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Blang Krueng Kecamatan Darussalam

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Aceh Kecamatan Syiah Kuala

Gampong Rukoh terdiri dari 5 dusun yaitu: Dusun Meunasah Tuha, Meunasah Baroe, Lam Ara, Lamnyong, dan Dusun Silang. Dalam satu kepala gampong dibantu oleh seorang sekretaris gampong, seorang imam gampong dan peutuha gampong dengan sembilan orang majelis serta di bantu oleh perangkat staf bidang kebutuhan administrasi di gampong.⁵⁰

b) Visi Misi

Visi gampong Rukoh adalah mewujudkan gampong yang Damai, Makmur, dan Islami. Misi gampong Rukoh adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan pelaksanaan syari'at islam secara kaffah
- b) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

⁵⁰ www.profilgampongrukoh.go.id diakses pada tanggal 25 September 2022 di Kota Banda Aceh

- c) Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas sehat dan sejahtera
- d) Memperkuat ekonomi kerakyatan
- e) Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pariwisata yang islami
- f) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, publik, keagamaan dan perlindungan anak.
- g) Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan
- h) Membina hubungan yang sinergis dengan pemerintah untuk kemajuan gampong⁵¹

c) Kependudukan

Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Syiah Kuala pada tahun 2018 adalah gampong Rukoh dengan jumlah penduduk 8682 jiwa. Banyaknya pendatang yang tinggal di gampong Rukoh menyebabkan adanya perpaduan adat, bahasa, maupun budaya berbaur menjadi satu di kalangan masyarakat gampong Rukoh. Dengan jumlah penduduk tersebut, gampong Rukoh membutuhkan perencanaan tata ruang yang bagus dalam peningkatan kualitas hidup melalui tempat tinggal, tempat bekerja, kemudahan transportasi serta kemudahan dalam memperoleh kebutuhan.⁵²

d) Mata Pencaharian

Banyaknya masyarakat gampong Rukoh yang berprofesi sebagai pegawai pemerintahan, pegawai swasta, dan juga sebagai tenaga jasa dan buruh lepas, hal ini di dukung oleh letak geografis gampong Rukoh yang berada di pinggiran Kota Banda Aceh serta jarak yang dekat antara Universitas UIN Ar-Raniry dan

⁵¹ ibid

⁵² ibid

Universitas Syiah Kuala. Dilihat dari potensi ekonomi, wilayah di gampong Rukoh sangat strategis untuk pengembangan sektor properti, baik berupa rumah kontrakan maupun kos-kosan bagi pendatang. Disamping untuk investasi properti, letak gampong Rukoh juga strategis untuk aspek perdagangan.

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	5	4	9
2	lainnya	1000	500	12
3	Pedagang	35	18	48
4	PNS	310	76	386
5	Buruh Harian Lepas	8	5	13
6	Wiraswasta	3000	3000	6000

Sumber: Data Hasil Dokumentasi Kantor Geuchik Gampong Jawa Pada Tahun 2021

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mata pencarian penduduk gampong Rukoh pada umumnya adalah pedagang, dan hanya sebagian kecil saja yang bermata pencarian sebagai petani, pekebun dan pekerjaan lainnya.

4.2. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kota Banda Aceh pada Gampong Jawa dan Gampong Rukoh

4.2.1. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Gampong Jawa

Dengan adanya Program Keluarga Harapan ini diharapkan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kelompok masyarakat miskin, namun hal tersebut tidak terwujud apabila masyarakat tidak mengetahui apa tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut masyarakat penerima PKH menjelaskan bahwa pemberian PKH ini disosialisasikan kepada masyarakat yaitu dengan menjelaskan manfaat dan kegunaan program ini. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Ya mengenai PKH ini kami masyarakat sebelum diberikan bantuan dikumpulkan oleh para pendamping dan mereka melakukan penjelasan dan sosialisai apa manfaat PKH ini.⁵³

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa setiap masyarakat yang mendapat bantuan PKH sudah disosialisasikan kegunaan dan manfaat dari bantuan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat lainnya dalam wawancaranya:

Saya mengetahui Program ini sebelum saya menjadi Keluarga Penerima Manfaat, karna pendamping sebelumnya sudah melakukan sosialisasi kepada calon penerima.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan masyarakat penerima PKH Gampong Jawa pada tanggal 20 Agustus 2022 di Gampong Jawa Kota Banda Aceh

⁵⁴ Wawancara dengan masyarakat penerima PKH Gampong Jawa pada tanggal 20 Agustus 2022 di Gampong Jawa Kota Banda Aceh

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa masyarakat sudah mendapat pemberitahuan terkait hak dan kewajiban mereka sebagai penerima bantuan PKH.

Namun berbeda masyarakat lainnya justru tidak mengetahui apa tujuan dari Program ini dan mereka hanya bersyukur menerima bantuan ini. Seperti yang dikatakan dalam wawancaranya:

Saya kurang paham program ini tujuannya untuk apa, tapi saya bersyukur sebagai lansia mendapat bantuan ini. Saya rasa program ini adalah program yang diberikan pemerintah untuk kami masyarakat miskin ataupun lansia seperti saya.⁵⁵

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa tidak semua masyarakat paham akan program PKH tersebut walaupun memang informasi dan pengetahuan yang ada di masyarakat mengenai PKH ini tentunya berbeda-beda, hal yang penting perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program adalah masyarakat memahami apa tujuan dari program ini agar tujuan dari PKH ini dapat tercapai.

Mengenai sosialisasi dan informasi program PKH ini menurut Pengawas Program Keluarga Harapan (PKH) mengatakan selama menjadi pendamping ataupun pengawas Keluarga Harapan selalu melakukan sosialisasi sebelum memberikan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal itu dikatakan menanggapi pernyataan beberapa peserta Program Keluarga Harapan

⁵⁵ Wawancara dengan masyarakat penerima PKH Gampong Jawa pada tanggal 20 Agustus 2022 di Gampong Jawa Kota Banda Aceh

yang tidak mengetahui tujuan program ini. Hal ini dijelaskan dalam wawancaranya:

Kalau untuk memberikan sosialisasi dalam memberikan bantuan pasti pendamping melakukan sosialisasi sebelum memberikan dana bantuan, mereka dikumpul kan sebelum menerimanya. Jikalaupun ada masyarakat yang tidak mengerti apa itu konsep dan tujuan Program Keluarga Harapan berarti masyarakat yang tidak peduli. Pastinya seluruh pendamping melakukan sosialisasi sebelum memberikan bantuan ini.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa pengawas PKH gampong Jawa terlebih dahulu menjelaskan dan menginformasikan kepada masyarakat kegunaan dari program PKH tersebut mereka dikumpulkan sebelum bantuan tersebut disalurkan. Jika masih ada masyarakat yang tidak paham maka dapat dipastikan bahwa masyarakat tersebut tidak peduli terhadap program tersebut.

Dalam proses untuk mengetahui dampak Program Keluarga Harapan, masyarakat merupakan objek penting yang harus diperhatikan. Masyarakat sebagai penerima bantuan harus diberikan informasi atau komunikasi yang jelas agar tujuan dari program dapat terwujud dan ada feedbacknya. Dari keseluruhan hasil penelitian diatas Program Keluarga Harapan sudah dilaksanakan dan di sosialisasikan dengan baik ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan sebelum memberikan bantuan di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun untuk penyampaian informasi atau sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal karena masih ada masyarakat yang

⁵⁶ Wawancara dengan Pengawas PKH Gampong Jawa pada tanggal 22 Agustus 2022 di Kantor Desa Gampong Jawa Kota Banda Aceh

tidak mengetahui tujuan dan konsep peran Program Keluarga Harapan (PKH). Seharusnya Program ini dilaksanakan secara maksimal agar berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Salah satu indikator melihat ada atau tidaknya dampak dari PKH terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat gampong Jawa dapat dilihat dari segi pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan RTSM melalui peningkatan pendidikan bersamaan tujuan khususnya memberikan bantuan pendidikan agar kualitas akses pelayanan pendidikan. Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh geuchik gampong Jawa dalam wawancaranya:

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan RTSM melalui peningkatan pendidikan bersamaan tujuan khususnya memberikan bantuan pendidikan agar kualitas akses pelayanan pendidikan. Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa program PKH ini bertujuan memutuskan rantai kemiskinan melalui peningkatan pendidikan dimana diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik di masa akan datang.

⁵⁷ Wawancara dengan Geuchik Gampong Jawa pada tanggal 21 Agustus 2022 di Kantor Desa Gampong Jawa Kota Banda Aceh

Lebih lanjut geuchik gampong jawa juga menjelaskan bahwa anak penerima PKH pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal serta hadir sekurang kurangnya 85% waktu tatap muka. PKH ini merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anaknya ke sekolah. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Anak penerima PKH pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal serta hadir sekurang kurangnya 85% waktu tatap muka. PKH ini merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anaknya ke sekolah.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa rentang usia anak penerima bantuan PKH ini berada pada 7-18 tahunan. Jika anak penerima program ini belum menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun maka wajib mendaftarkan diri ke sekolah formal serta hadir paling sedikit 85%. Program ini dimaksudkan agar membantu masyarakat miskin untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Program Keluarga Harapan ini menurut salah satu penerima sangat membantu terutama dibidang pendidikan.

PKH sangat membantu, terutama dibidang pendidikan dimana kalau setelah libur sekolah anak sekolah memerlukan baju sekolah yang baru

⁵⁸ Wawancara dengan Geuchik Gampong Jawa pada tanggal 21 Agustus 2022 di Kantor Desa Gampong Jawa Kota Banda Aceh

dan perlengkapan yang baru. Jadi dengan adanya PKH ini bisa buat beli perlengkapan sekolah.⁵⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa PKH dapat memberikan dampak baik seperti setelah libur sekolah anak sekolah memerlukan baju sekolah yang baru dan perlengkapan yang baru, agar anak sekolah yang miskin tidak minder bergaul dengan anak yang lain.

Namun hal berbeda disampaikan oleh beberapa anggota penerima lainnya bahwa mereka tidak mengetahui apa dampak dari Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Saya rasa tidak terlalu berpengaruh karena gampong ini yang menerima bantuan program ini yang bersekolah masih SD kebanyakan. Selain itu tidak ada dampak program PKH dalam bidang pendidikan karena ada beberapa anak termasuk anakku tidak bersekolah walaupun umurnya sudah harus bersekolah.⁶⁰

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa dampak PKH terhadap dunia pendidikan masih sangat rendah atau tidak stabil hal ini dikarenakan masih ada anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan.

Akan tetapi Pengawas Keluarga Harapan Gampong Jawa mengklaim bahwa Program ini memiliki dampak yang cukup baik. Hal ini dikatakan

⁵⁹Wawancara dengan masyarakat penerima PKH Gampong Jawa pada tanggal 20 Agustus 2022 di Gampong Jawa Kota Banda Aceh

⁶⁰ Wawancara dengan masyarakat penerima PKH Gampong Jawa pada tanggal 20 Agustus 2022 di Gampong Jawa Kota Banda Aceh

menanggapi pernyataan para peserta yang mengaku tidak mengetahui apa dampak program ini terhadap pendidikan. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Peran PKH cukup baik ya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara memberikan bantuan uang tunai yang dapat menstimulasi masyarakat agar orang tua dapat memenuhi kebutuhan sekolah anak dalam bentuk seragam maupun alat tulis, kemudian untuk mengawasi pendidikan ada namanya verifikasi komitmen, dimana anak didik secara berkala dikunjungi kesekolah untuk melihat kehadiran dan sikap anak disekolah.⁶¹

Partisipasi anak kesekolah merupakan bagian dari program ini agar terwujudnya pendidikan yang baik. Masyarakat harus memberikan motivasi terhadap anaknya agar tetap rajin kesekolah. Demi berjalannya peran Program Keluarga Harapan (PKH), pendidikan merupakan komponen yang dijadikan tujuan utama. Pendidikan sebagai tujuan utama harus diperhatikan dengan maksimal agar program ini terwujud dan nyata dapat mensejahterakan masyarakat miskin. Dari keseluruhan informasi diatas mengenai peran Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan taraf pendidikan, partisipasi kesekolah masih kurang maksimal karena tidak berpengaruh nya program ini terhadap partisipasi anak ke sekolah dibuktikan dengan banyak anak sekolah yang malas kesekolah bahkan tidak bersekolah. Seharusnya peran terhadap pendidikan harus dimaksimalkan karena pendidikan merupakan tonggak kesuksesan masyarakat agar hidup sejahtera, dan agar program yang dilaksanakan tepat sasaran.

⁶¹ Wawancara dengan Pengawas PKH Gampong Jawa pada tanggal 22 Agustus 2022 di Kantor Desa Gampong Jawa Kota Banda Aceh

Selain pendidikan dapat juga dilihat dari penghasilan keluarga masyarakat Jawa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat gampong Jawa. Hal ini dikarenakan Pendapatan keluarga merupakan komponen utama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera, maka dari itu pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki program untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga agar pendapatan keluarga dapat memenuhi segala kebutuhan pokok. Terpenuhinya segala kebutuhan pokok merupakan syarat mutlak agar tercipta kondisi keluarga yang sejahtera secara ekonomi.

Mengenai program ini memiliki dampak seluruh Keluarga Penerima Manfaat mengatakan membantu peronomian keluarga karena menolong biaya pendidikan anak. Seperti yang disampaikan oleh salah satu penerima bantuan program PKH dalam wawancaranya:

Ya pastinya membantu, masyarakat seperti kami yang hanya masyarakat yang berpenghasilan rendah diberi duit untuk biaya sekolah anak.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa program PKH memberikan dampak yang baik untuk mereka yang berpenghasilan rendah dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Kemudian mengenai bentuk bantuan seperti apa yang diterima masyarakat dari program ini seluruh KPM mengatakan bentuk bantuan yang diterima hanya duit tunai. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Hanya diberikan duit saja dikasih dan 4 kali dalam setahun.⁶³

⁶² Wawancara dengan masyarakat penerima PKH Gampong Jawa pada tanggal 20 Agustus 2022 di Gampong Jawa Kota Banda Aceh

Selanjutnya mengenai dampak dari PKH dalam meningkatkan pendapatan keluarga di gampong Jawa seluruh informan mengatakan tidak ada dampak yang meningkatkan perekonomian mereka. Hal ini dijelaskan dalam wawancarnya:

Ya, kalau untuk pendapatan tidak ada, karna kami hanya diberi bantuan duit tunai saja.⁶⁴

Menanggapi beberapa pernyataan peserta mengenai dampak program terhadap pendapatan keluarga, pengawas PKH gampong Jawa mengatakan untuk gampong Jawa sudah memiliki program KUBE sebagai usaha bersama yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Didalam peningkatakan pendapatan masyarakat di gampong Jawa belum ada, akan tetapi secara global Program Keluarga Harapan ada melakukan program yang namanya KUBE yaitu usaha bersama. Dimana kelompok atau daerah daerah tertentu yang mendapatkan KUBE ini diberikan bantuan modal oleh pemerintah dan juga arahan-arahan untuk membenuk suatu kelompok usaha yang diharapkan mampu untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan pendapatan masyarakat. Contoh sperti di gampong Jawa di bawah bimbingan kecamatan Kuta Raja ada kelompok KUBE, dimana jajanan yang dijual dipinggir jalan banyak dikelola oleh KUBE peserta PKH.⁶⁵

Dari hasil pernyataan diatas terlihat bahwa program ini hanya membantu keuangan untuk kehidupan sehari hari dan perlengkapan anak sekolah. Bentuk

⁶³ Wawancara dengan masyarakat penerima PKH Gampong Jawa pada tanggal 20 Agustus 2022 di Gampong Jawa Kota Banda Aceh

⁶⁴ Wawancara dengan masyarakat penerima PKH Gampong Jawa pada tanggal 20 Agustus 2022 di Gampong Jawa Kota Banda Aceh

⁶⁵ Wawancara dengan Pengawas PKH Gampong Jawa pada tanggal 22 Agustus 2022 di Kantor Desa Gampong Jawa Kota Banda Aceh

bantuan yang hanya uang tunai kepada masyarakat membuat bantuan ini kurang optimal karna dipakai hanya cukup untuk membeli perlengkapan sekolah anak dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan di dalam Program Keluarga Harapan ada yang namanya KUBE yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang mayoritas hanya masyarakat berpenghasilan rendah. Ini menunjukkan didalam komponen pendapatan keluarga program ini sangat tidak maksimal. Seharusnya anggota program PKH ini mampu mewujudkan produk produk unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Gampong Rukoh dapat dilihat dari komponen pendidikan, kesehatan dan pendapat keluarga. Pendidikan merupakan tujuan utama dalam menentukan kesejahteraan masyarakat miskin, namun itu tidak akan terwujud kalau masih banyak anak yang tidak duduk dibangku sekolah karna keterbatasan dana. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang diciptakan pemerintah untuk masyarakat miskin agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemiskinan. Anak-anak merupakan harapan bangsa untuk membangun negeri ini kedepannya, pemerintah sadar akan hal itu sehingga tercipta program ini. Keberhasilan program ini akan berjalan baik jika komunikasi antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah telah memberikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat miskin tetapi masyarakat miskin yang tidak peduli dengan bantuan ini, tidak mau bekerja sama untuk mensukseskan program ini. Ini terlihat di Gampong Jawa dimana masih adanya anak anak yang tidak sekolah dengan alasan

malas dan tidak niat untuk bersekolah, dan ada juga yang bersekolah tapi tidak rajin untuk hadir ke sekolah. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dusun Peanornor membuktikan program ini belum banyak memberikan peran di bidang pendidikan karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berpendapat ada tidaknya program ini anak anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih ada saja yang malas untuk bersekolah. Tentunya ini akan menghambat kesejahteraan masyarakat miskin di Gampong Jawa karena kesadaran perlunya untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

4.2.2. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Rukoh

Dalam hal ini Program Keluarga Harapan merupakan perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu keluarga miskin dalam hal mendapatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga peserta PKH dengan harapan program ini akan dapat mengurangi kemiskinan. Seperti yang diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota Rumah Tangga Sangat Miskin itu sendiri diwajibkan melaskan akan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Tidak ada satu orang pun yang merasakan dirugikan dengan adanya bantuan pemerintah ini, semua masyarakat baik yang termasuk dalam peserta penerima bantuan atau pun tidak masuk dalam peserta penerima sangat bangga dengan adanya program ini, yang menurut pemahaman orang bantuan ini sangat

membantu biaya pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh geuchik gampong Rukoh dalam wawancaranya:

Tidak ada masyarakat yang merasakan dirugikan dengan adanya bantuan pemerintah ini, semua masyarakat baik yang termasuk dalam peserta penerima bantuan atau pun tidak masuk dalam peserta penerima sangat bangga dengan adanya program ini, yang menurut pemahaman orang bantuan ini sangat membantu biaya pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat.⁶⁶

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa masyarakat merasa senang menerima bantuan pemerintah dalam bentuk PKH tersebut. Hal ini dikarenakan bantuan ini akan mampu meringankan beban masyarakat.

Kemudian menurut penerima bantuan sejak adanya Program Keluarga Harapan terbukti lebih mensejahterakan para peserta penerima PKH. Mereka juga berharap agar PKH terus dilanjutkan karena sangat membantu masyarakat dalam menanggulangi keluarga miskin khususnya untuk membiayai pendidikan dan juga membantu mencukupi kebutuhan kesehatan keluarga mereka.

Sejak adanya PKH sangat membantu untuk sekolah anak saya, membeli perlengkapan-perengkapan sekolah anak-anak saya, Alhamdulillah sangat terbantu sekali.⁶⁷

Kemudian hasil wawancara peserta PKH lainnya di gampong Rukoh juga mengatakan bahwa:

⁶⁶ Wawancara dengan Geuchik Gampong Rukoh pada tanggal 24 Agustus 2022 di Kantor Desa Gampong Rukoh Kota Banda Aceh

⁶⁷ Wawancara dengan masyarakat penerima PKH Gampong Rukoh pada tanggal 15 Agustus 2022 di Gampong Rukoh Kota Banda Aceh

Sejak menerima bantuan PKH ekonomi keluarga saya sedikit terbantu terutama untuk anak-anak saya yang masih sekolah, dengan menerima bantuan PKH bisa memenuhi kebutuhan dan perlengkapan sekolah anak-anaknya, meski kadang di pergunakan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras dan lain-lain.⁶⁸

Selain itu hal senada juga disampaikan oleh beberapa anggota PKH lainnya bahwa:

Dengan adanya PKH ini sedikit membantu perekonomian keluarga sejak saya mengandung, uang yang saya dapat saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan saya khususnya bisa sedikit mencukupi gizi untuk anak dalam kandungan saya, seperti saya membeli susu untuk Ibu Hamil, membeli buah-buahan, dan lain sebagainya⁶⁹.

Dari beberapa jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan sudah dapat membantu dan berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga yang menerima bantuan tersebut. Dimana para penerima sudah merasa sedikit terbantu dengan adanya bantuan PKH yang mereka terima selama ini.

Kemudian dari segi komunikasi yang terjalin dengan baik antara pendamping dan peserta PKH dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk memenuhi syarat wajib bagi peserta PKH sebelum memperoleh hak menerima dana sebagai peserta PKH di rekeningnya. Dirasakan oleh peserta PKH pihak Dinas Sosial sudah melakukan komunikasi dengan peserta PKH sehingga

⁶⁸ Wawancara dengan masyarakat penerima PKH Gampong Rukoh pada tanggal 15 Agustus 2022 di Gampong Rukoh Kota Banda Aceh

⁶⁹ Wawancara dengan masyarakat penerima PKH Gampong Rukoh pada tanggal 15 Agustus 2022 di Gampong Rukoh Kota Banda Aceh

dapat memberikan manfaat bagi para peserta penerima bantuan untuk memecahkan persoalan hidup sehari-hari mereka. Hal ini disampaikan oleh geuchik gampong Jawa dalam wawancaranya:

Dari awal menerima bantuan sudah dilakukan sosialisasi dari pihak Dinas Sosial dan juga pendamping, mereka memberi tahu tujuan dari diberikannya bantuan ini dan digunakan untuk apa saja uang yang diterima. Untuk pendamping juga rutin melakukan pertemuan dengan anggota PKH, dan selalu memberi informasi ketika dana bantuan akan dicairkan.⁷⁰

Hal senada juga dijelaskan oleh pengawas PKH gampong Rukoh bahwa sosialisasi program ini sudah dilakukan kepada peserta PKH setelah mereka ditetapkan sebagai anggota penerima. Sehingga masyarakat paham akan kegunaan ataupun manfaat dari bantuan tersebut. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Kami melakukan sosialisasi program ini kepada peserta PKH setelah mereka ditetapkan sebagai anggota penerima. Sehingga masyarakat paham akan kegunaan ataupun manfaat dari bantuan tersebut.⁷¹

Dengan demikian, proses sosialisasi telah dilakukan dengan baik dan benar secara rutin oleh pihak Dinas Sosial mengenai tujuan dari PKH. Para pendamping PKH juga senantiasa menginformasikan kepada penerima tentang waktu pencairan bantuan PKH tersebut, dan rutin melakukan pertemuan dengan penerima PKH.

⁷⁰ Wawancara dengan Geuchik Gampong Rukoh pada tanggal 24 Agustus 2022 di Kantor Desa Gampong Rukoh Kota Banda Aceh

⁷¹ Wawancara dengan Pengawas PKH Gampong Rukoh pada tanggal 19 Agustus 2022 di Kantor Desa Gampong Rukoh Kota Banda Aceh

Selanjutnya geuchik Gampong Rukoh juga menyampaikan bahwa program PKH ini mampu mensejahterakan masyarakat miskin hal ini ditandai dengan berkurangnya masyarakat miskin dan menurunnya penerima PKH pada tahun 2021 dimana pada tahun sebelumnya sebanyak 52 peserta. Pengurangan tersebut dikarenakan ada beberapa anggota PKH yang merasa sudah mampu dan mengundurkan diri sebagai peserta PKH. Hal ini diungkapkan dalam wawncaranya:

Program PKH ini mampu mensejahterakan masyarakat miskin hal ini ditandai dengan berkurangnya masyarakat miskin dan menurunnya penerima PKH pada tahun 2021 dimana pada tahun sebelumnya sebanyak 52 peserta. Pengurangan tersebut dikarenakan ada beberapa anggota PKH yang merasa sudah mampu dan mengundurkan diri sebagai peserta PKH.⁷²

Pernyataan di atas juga di pertegas oleh penuturan yang disampaikan oleh pengawas PKH gampong Jawa bahwa adanya pengunduran diri peserta PKH pada tahun 2021 dimana yang sebelumnya sebanyak 52 orang sekarang hanya sisa 48 orang. Hal ini disampaikan dalam wawncaranya:

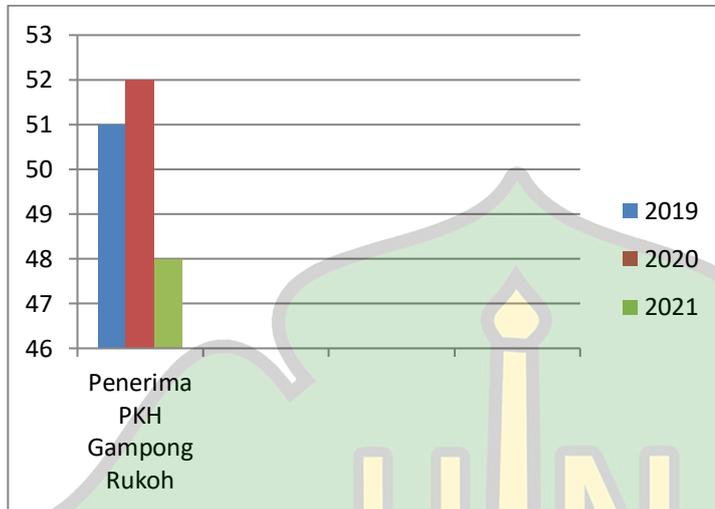
Benar ada pengunduran diri peserta PKH pada tahun 2021 dimana yang sebelumnya sebanyak 52 orang sekarang hanya sisa 48 orang.⁷³

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa program PKH mampu memberikan dampak terhadap meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan

⁷² Wawancara dengan Geuchik Gampong Rukoh pada tanggal 24 Agustus 2022 di Kantor Desa Gampong Rukoh Kota Banda Aceh

⁷³ Wawancara dengan Pengawas PKH Gampong Rukoh pada tanggal 19 Agustus 2022 di Kantor Desa Gampong Rukoh Kota Banda Aceh

masyarakat gampong Rukoh. Hal ini ditandai dengan adanya penurunan peserta penerima PKH di Gampong Rukoh.



Sumber data: Kantor Geuchik Gampong Rukoh

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa penerima PKH Gampong Rukoh pada tahun 2019 sebanyak 51 peserta, kemudian meningkat pada tahun 2020 yaitu sebanyak 52 peserta, kemudian menurun pada tahun 2021 yaitu sebanyak 48 peserta. Hal ini menandakan adanya dampak baik dari program PKH terhadap perekonomian masyarakat gampong Rukoh.

4.3. Analisis Penulis

Dari hasil lapangan menunjukkan bahwa Dampak Program Keluarga Harapan di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

- a) Dengan diluncurkannya program keluarga harapan tersebut mampu menampung anak-anak untuk bersekolah. Sebagaimana berdasarkan data yang telah disajikan di atas terlihat program tersebut membantu pembiayaan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak yang berasal keluarga miskin.
- b) Dengan hadirnya program PKH tersebut di tengah-tengah masyarakat mampu mengurangi angka kemiskinan terutama di gampong Rukoh
- c) Dengan adanya program PKH memberikan dampak yang baik bagi perbaikan gizi anak, hal ini dikarenakan program PKH memfokuskan pada kesehatan anak dan ibu hamil.
- d) Dengan adanya program PKH mmemberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Banda Aceh terutama pada Gampong Rukoh.

Kemudian jika kita kaitkan dengan teori kemiskinan maka dapat dilihat dari komponen kemiskinan structural yang menyatakan bahwa kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan struktural muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan

sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada disekitarnya.

Hal tersebut sesuai dengan yang terjadi di gampong Jawa dimana fakta lapangan membuktikan bahwa implementasi program PKH ini belum sepenuhnya memberikan dampak baik saja akan tetapi terdapat juga tidak memberikan dampak apapun kepada masyarakat. Hal ini terlihat di Gampong Jawa yang mana masih banyak anak-anak tidak bersekolah dikarenakan program tersebut tidak tepat sasaran.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Program bantuan PKH pada gampong Jawa terlihat tidak berdampak pada perekonomian masyarakat gampong Jawa. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat Jawa yang tidak sejahtera dari segi ekonomi bahkan banyak anak-anak gampong Jawa yang seharusnya usia sekolah tidak bersekolah dengan alasan kekurangan dari segi ekonomi. Namun berbanding terbalik yang terjadi di Gampong Rukoh dimana pendidikan anak-anak gampong Rukoh terjamin dan terjadi peningkatan terhadap perekonomian masyarakat Rukoh. Hal ini menandakan adanya dampak positif dari program PKH terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat gampong Rukoh.

5.2. Saran

1. Perlu dilakukan evaluasi, agar terjadi perbaikan pendampingan secara konsisten. Perlu adanya pelatihan pemberdayaan kepada pendamping agar lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping yang profesional. Sehingga bisa mengentaskan kemiskinan di masyarakat sesuai tujuan program PKH.
2. Pemerintah desa atau petugas PKH perlu melakukan pengawasan dan pemahaman kepada RTSM agar dana tunai yang diterima dari program PKH bisa digunakan sesuai ketentuan PKH. Baik untuk perbaikan kualitas pendidikan maupun kesehatan peserta PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Eky Riskiana, “Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wono Pringo)”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, (2020)
- F. Gunawan Suratmo, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Cet 10 (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2014)
- Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) cet pertama (Jakarta, Rajawali Pers, 2013)
- Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Kahfi Septian Mawarni Universitas Galuh. Kahfi Septian Mawarni melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. 2019
- Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018,
- Munawwarah Shahib Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Munawwarah Shahib melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 2019
- PKH, Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, <http://pkh-dasarhukum> /diakses pada 5 Agustus 2021 pukul 10.30
- Rohiman Notowidagdo, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Berwawasan Iman dan Takwa, Cet Pertama (Jakarta, Amzah 2016)
- Skripsi Dulfikar Asmawi, mahasiswa Universita Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, dengan judul: Efektifitas peran pendamping progrsm kelusrga harapan (pkh) di kecamatan jetis bantul. 2018
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Ucu Martanto, Kebijakan Sosial dan Kesejahteraan (Yogyakarta fisipol UGM
2008)



LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian Digampong Jawa



2. Dokumentasi Penelitian Digampong Rukoh

